

## **MIGRASI DAN PEMBANGUNAN REGIONAL ANTARA MITOS DAN REALITAS : Perspektif Teori, Kondisi Empirik Indonesia dan Prospeknya dalam Era Otonomi Daerah**

oleh:  
**R. Rijanta**

Staf pengajar Fakultas Geografi dan Peneliti Pada Pusat Studi Perencanaan Pembangunan Regional (PS-PPR), Universitas Gadjah Mada., Yogyakarta.

### **INTISARI**

*Tulisan ini bertujuan (1). Memetakan keragaman pandangan teoretik atas hubungan antara migrasi dan pembangunan, (2). Membuktikan secara empirik hubungan antara migrasi dan pembangunan di Indonesia dan (3). Memberikan penilaian atas prospek migrasi dalam pembangunan pada era otonomi daerah.*

*Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut dilakukan kajian terhadap teori-teori yang relevan memberikan penjelasan antara migrasi dan pembangunan untuk menjelaskan keragaman teori tentang hubungan antara migrasi dan pembangunan. Analisis data sekunder dilakukan untuk mengetahui hubungan antara variabel-variabel migrasi dan variabel-variabel pembangunan regional di Indonesia dalam rangka menguji secara empirik hubungan antara migrasi dan pembangunan regional.*

*Hasil analisis menunjukkan bahwa secara teoretik terdapat dua pandangan yang berseberangan tentang hubungan antara migrasi dan pembangunan, yaitu pandangan ekonomi neo-klasik dan pandangan historis struktural. Indonesia termasuk salah satu negara yang memiliki kebijakan migrasi yang berakar pada pandangan ekonomi neo-klasik. Pandangan ini percaya bahwa migrasi bernilai positif dalam pembangunan regional, sehingga kebijakan-kebijakan kependudukan di Indonesia umumnya cenderung pro-migrasi. Sementara itu pada tingkat empirik pola migrasi di Indonesia sampai pertengahan 1990an dan bahkan sampai kini masih bersifat Jakarta sentris, sehingga dampaknya cenderung semakin memperkuat kesenjangan antar wilayah yang sudah ada.*

*Hasil korelasi menunjukkan bahwa migrasi memiliki hubungan positif terhadap lapangan kerja sektor-sektor modern dan negatif terhadap sektor pertanian. Selain itu migrasi secara konsisten berhubungan negatif dengan nilai produk domestik regional brutto (PDRB) sektor pertanian dan tidak memiliki hubungan yang jelas terhadap PDRB sektor-sektor modern yang lain, kecuali sektor perbankan. Ini berarti migrasi berperan penting dalam menciptakan kesempatan kerja, tetapi belum memiliki kontribusi yang bermakna dalam peningkatan kapasitas produksi daerah. Dalam era otonomi daerah migrasi diperlukan terutama di wilayah-wilayah yang bertipe resource frontier di mana sumberdaya alam yang ada masih cukup besar sementara sumberdaya manusia untuk mengolahnya tidak tersedia setempat.*

**Kata kunci:** *Migrasi, Pembangunan Regional Indonesia, Otonomi Daerah*

## PENDAHULUAN

Migrasi penduduk penting artinya bagi perkembangan wilayah karena melalui mekanisme ini perbedaan komposisi kependudukan antarwilayah akan terbentuk. Oleh karena setiap migrasi hampir selalu selektif oleh umur dan jenis kelamin, gerak penduduk antarwilayah juga memberikan perubahan-perubahan jangka panjang dalam komposisi demografis, sosial maupun ekonomi, baik di daerah asal maupun di daerah tujuannya. Wilayah-wilayah tujuan migrasi memiliki penduduk dengan struktur yang sangat berbeda jika dibandingkan dengan wilayah pengirim migran. Perbedaan yang sangat mudah diamati antara lain adalah komposisi demografis (seperti umur, jenis kelamin maupun struktur rumahtangganya), keadaan sosial-budaya (seperti pendidikan, agama, bahasa percakapan sehari-hari dan komposisi etnis) serta kondisi ekonomi (seperti kesempatan kerja, dan pendapatan). Dengan cara pandang yang lain komposisi demografi, sosial, dan ekonomi tertentu merupakan cerminan pentingnya migrasi dalam menciptakan perubahan sosial-ekonomi di suatu wilayah.

Dari uraian tersebut dapat dikenali adanya hubungan dua arah dan timbal-balik antara mobilitas penduduk dan proses pembangunan ekonomi dan perubahan sosial. Migrasi internal sebagai salah satu bentuk mobilitas penduduk merupakan *respons terhadap* dan sekaligus *memiliki pengaruh terhadap* perbedaan-perbedaan antarwilayah maupun antarkelompok masyarakat di dalam suatu negara. Migrasi internal di Indonesia selama ini cenderung dipandang sebagai salah satu komponen penting di dalam perkembangan maupun pengembangan wilayah, karena sudah dikenal bahwa Indonesia memiliki program transmigrasi yang dimulai dengan kolonisasi satu abad yang lalu. Oleh karena itu tidak berlebihan jika dikatakan migrasi merupakan salah satu komponen penting dalam kebijakan redistribusi penduduk di Indonesia. Selain itu juga terdapat program-program pengeralahan tenaga kerja antardaerah maupun antarnegara yang juga mengindikasikan adanya kebijakan serupa. Dari perspektif ini sebenarnya Indonesia dapat dikatakan memiliki kebijakan kependudukan pro-migrasi.

Meskipun demikian terdapat juga bukti-bukti lain yang menunjukkan kondisi sebaliknya. Hal ini dapat dibuktikan dari adanya beberapa daerah yang memberikan kebijakan disinsentif bagi migrasi masuk. Penerapan rasia KTP terhadap pendatang di Jakarta, misalnya, dapat dilihat sebagai suatu bentuk kebijakan anti-migrasi. Demikian juga dengan bentuk-bentuk kebijakan disinsentif seperti syarat penyerahan sejumlah uang deposit kepada penguasa di daerah tujuan sebelum seseorang menetap.

Meskipun umumnya dipercaya bahwa migrasi dapat memberikan sumbangan positif bagi perkembangan wilayah (Mantra, 1989 dan Rigg, 2001), tetapi sejauh ini belum ada bukti-bukti empirik yang menunjukkan adanya hubungan di antara keduanya. Tulisan ini bermaksud mengisi gap pengetahuan tentang hubungan antara migrasi dan pembangunan daerah di Indonesia. Selain itu untuk mengawali diskusi tentang hubungan antara migrasi dan pembangunan regional dalam paper ini dibuat suatu tinjauan teoretik mengenai migrasi dan perkembangan wilayah.

## TUJUAN

Paper singkat ini bermaksud mengeksplorasi hubungan antara migrasi dan perkembangan daerah pada aras teoretik dan aras empiri menggunakan data Indonesia dalam rangka memprediksi peranan migrasi dalam perkembangan regional dan faktor-faktor yang berpotensi menentukan peran migrasi dalam pembangunan regional di daerah tujuan pada era otonomi daerah.

## METODE ANALISIS

Untuk mencapai tujuan penulisan paper ini dilakukan penelaahan teori yang relevan, hasil-hasil penelitian yang ada dan analisis data sekunder yang menggambarkan hubungan migrasi dan pembangunan regional di Indonesia. Penelaahan terhadap teori difokuskan pada teori tentang hubungan antara migrasi dan pembangunan regional, determinan dan konsekuensi migrasi internal. Sementara kajian terhadap studi sebelumnya difokuskan pada pola dan arah migrasi penduduk di Indonesia dalam rangka menggambarkan hubungan antara migrasi dan pembangunan regional. Namun karena studi-studi yang secara eksplisit bermaksud menemukan hubungan antara migrasi dan pembangunan regional belum dijumpai untuk kasus Indonesia, paper singkat ini juga berupaya menunjukkannya melalui analisis korelasi untuk mendukung interpretasi hasil-hasil studi sebelumnya.

Analisis hubungan antara migrasi dan pembangunan regional didasarkan pada studi-studi yang sudah ada dan dilengkapi dengan analisis data sekunder dalam unit analisis propinsi. Analisis ini bermaksud memberi gambaran yang lebih utuh tentang pola migrasi di Indonesia beserta peranannya dalam pembangunan regional. Dalam analisis data sekunder dimanfaatkan hasil SUPAS 1995 untuk mengidentifikasi variabel-variabel migrasi total, migrasi semasa hidup dan migrasi risen. Dari dokumen yang sama dapat juga diekstrak data struktur kegiatan penduduk dan kesempatan kerja.

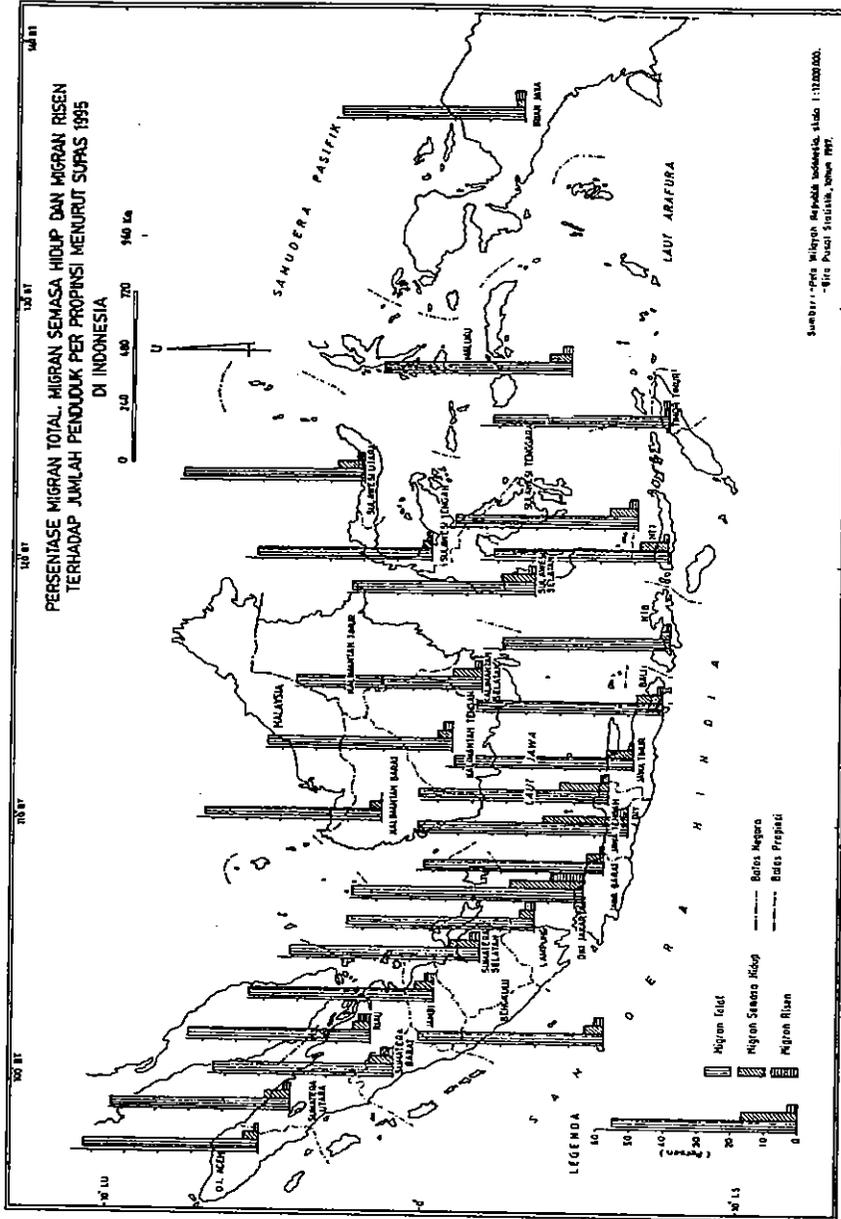
Data tentang kinerja ekonomi wilayah diperoleh dari publikasi tentang Produk Domestik Regional Brutto (PDRB) Propinsi-propinsi di Indonesia 1993-1995. Selain itu juga dimanfaatkan hasil analisis Hill (1996) tentang pembangunan daerah di Indonesia yang memuat data hasil-hasil pembangunan sosial, ekonomi, dan demografi antarpropinsi. Analisis ini memiliki keterbatasan-keterbatasan yang tidak dapat dihindarkan sebagai konsekuensi kelangkaan data terbaru. Sampai saat ini belum dapat diperoleh data migrasi dari hasil Sensus Penduduk 2000, sehingga kondisi migrasi yang diperoleh masih mewakili kondisi tahun 1995.

Keterbatasan lainnya adalah pembatasan ruang dalam definisi migrasi yang menggunakan wilayah propinsi. Mengingat bentuk, ukuran, dan konfigurasi fisik wilayah propinsi-propinsi di Indonesia sangat beragam, konsep migrasi antarpropinsi sebenarnya mengandung generalisasi dan penyederhanaan yang agak berlebihan (Titus, 1978 dan 1992). Konsekuensi dari generalisasi ini adalah ditemukannya kesan hubungan-hubungan yang kurang konsisten antara migrasi dan variabel-variabel yang

**Tabel 1. Ringkasan Perbandingan Perspektif Ekonomi Ekuilibrium dan Historis Struktural**

Aspek yang Dibandingkan	Perspektif Ekonomi Ekuilibrium Neo-Klasik	Perspektif Historis- Struktural
Penyebab migrasi internal	Migrasi internal merupakan respon atas kesenjangan distribusi spasial lahan, tenaga kerja, kapital, dan sumberdaya alam.	Kekuatan-kekuatan struktural seperti ekspansi moda produksi kapitalis, karakteristik kebijakan pembangunan pemerintah, kesenjangan antarwilayah dan negara serta ciri-ciri ekonomi politik negara.
P a n d a n g a n tentang hubungan migrasi dengan perkembangan regional	Migrasi internal memiliki dampak positive mempercepat laju perkembangan daerah karena intensitas kesenjangan spasial akan berkurang sebagai hasil dari redistribusi sumberdaya manusia dari tempat dengan produktivitas rendah ke tempat dengan produktivitas yang tinggi.	Migrasi Internal memiliki dampak negatif. Konsentrasi yang berlebihan akan memperlebar kesenjangan antarwilayah. Kesenjangan ini mengakibatkan inefisiensi serta masalah-masalah sosial eko orang-orang yang terpelajar, sumberdaya dan kapital di suatu tempat tertentu (khususnya kota besarnomi baik di daerah asal maupun di daerah tujuan serta menghambat pembangunan nasional.
Implikasi kebijakan	Membebaskan kekuatan-kekuatan pasar untuk beroperasi. Intervensi hanya digunakan untuk mempercepat atau mengatur arus migrasi antardaerah dengan cara menghilangkan hambatan-hambatan yang dapat menghalangi arus gerakan penduduk	Intervensi diberikan sebagai bagian dari upaya-upaya untuk mengurangi kesenjangan. Kebijakan-kebijakan pemerintah dalam mempengaruhi migrasi sangat kecil peluangnya untuk berhasil, kecuali kekuatan-kekuatan ekonomi politik yang menjadi akar permasalahan kesenjangan dapat diatasi.

Sumber: Hugo, 1987



Gambar 1. Peta Distribusi Migran Total, Migran Semasa Hidup dan Migran Risen Menurut Propinsi di Indonesia Tahun 1995

Perspektif historis struktural memandang migrasi sebagai konsekuensi dari kinerja kekuatan-kekuatan struktural seperti ekspansi modal produksi kapitalis secara global, karakteristik kebijakan pembangunan yang berorientasi pertumbuhan dan bersifat *urban-bias*, kesenjangan antarwilayah yang semakin besar serta sistem ekonomi politik yang kurang populis. Pandangan historis struktural melihat migrasi sebagai bagian dari masalah struktural yang muncul dari kinerja kekuatan-kekuatan struktural dunia yang menempatkan hubungan antara negara maju dan negara sedang berkembang berturut-turut sebagai *center* dan *periphery* (Amin, 1974, Titus, 1978 dan Titus, 1992).

Kekuatan kapitalisme negara maju bekerja melalui perusahaan multinasional yang menempatkan kota-kota di negara sedang berkembang sebagai kepanjangan tangannya untuk menjangkau wilayah-wilayah *periphery*. Selanjutnya kota-kota di negara sedang berkembang juga berperanan menjadi *center* bagi *periphery* wilayah *hinterland*-nya. Demikianlah hubungan *center-periphery* ini berjenjang ke unit-unit wilayah yang paling bawah. Satu sifat penting hubungan *center-periphery* yang memicu terjadinya migrasi adalah adanya hubungan yang asimetris atau *parasitic* antar keduanya (Harris and Haris, 1984). Wilayah *center* juga cenderung melakukan eksploitasi atas *periphery* dalam mencapai pertumbuhannya dengan memanfaatkan kesenjangan neraca perdagangan desa-kota, distorsi harga komoditas pertanian oleh kebijakan pemerintah, arus migrasi dari desa ke kota (*brain drain*) dan penetrasi produk-produk kapitalis ke desa dengan harga yang relatif lebih mahal daripada komoditas pertanian.

Dalam pandangan historis struktural kondisi hubungan asimetris *center-periphery* di negara sedang berkembang diperburuk oleh kebijakan pembangunan yang bias ke kota, mengejar pertumbuhan dan mengorbankan pemerataan. Dalam konstelasi seperti ini pandangan historis struktural terhadap migran adalah sebagai korban dari kesenjangan hubungan struktural dan kinerja sistem ekonomi politik yang tidak adil. Oleh karena itu usaha mengatur migrasi tidak pernah efektif atau hanya akan memiliki peluang keberhasilan yang kecil, kecuali hambatan-hambatan struktural yang ada dapat diatasi.

Dua pandangan di atas memiliki perbedaan-perbedaan yang sangat tajam dalam cara pandang terhadap migrasi, kepercayaan tentang hubungan antara migrasi dan pembangunan serta bentuk-bentuk kebijakan mengatasi migrasi yang relevan. Penganut perspektif neo-klasik pada umumnya berpikir pragmatis dan berpijak pada realita empirik yang dapat dikerjakan pemerintah untuk mengelola migrasi secara realistis. Rekomendasi kebijakan dari perspektif historis struktural sangat jarang dilakukan, karena korban sosial-politik perubahan struktural yang dianjurkan terlalu besar dan tidak dapat ditanggung oleh kebanyakan negara sedang berkembang. Meskipun demikian pandangan historis struktural secara meyakinkan dapat menjelaskan fenomena migrasi internal di negara-negara sedang berkembang setelah periode kolonisasi (Amin, 1974; Titus 1978 dan 1992), tetapi implikasi kebijakannya kurang populer.

Kisah sukses pembangunan di Asia Timur merupakan salah satu contoh pembangunan yang berangkat dari reformasi struktural yang diikuti menguatnya migrasi antardaerah yang kondusif bagi perkembangan daerah. Pengalaman Korea, Jepang dan Taiwan menunjukkan bahwa reformasi struktural akhirnya mampu memfasilitasi

berlangsungnya mobilitas penduduk dan industrialisasi dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi disertai dengan tingkat pemerataan yang amat baik serta secara spasial menghasilkan perkembangan wilayah yang sangat terdesentralisasi (Ho, 1979 dan 1982).

Dalam era otonomi daerah di Indonesia tengah terjadi perubahan besar-besaran dalam proses pengambilan keputusan alokasi sumberdaya pembangunan. Pemerintah pusat mengurangi peranannya dalam urusan pengelolaan sumberdaya di daerah, sedangkan pemerintah daerah memperoleh kesempatan optimalisasi pengelolaan sumberdaya pembangunan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan demikian secara institusional tidak tersedia infrastruktur untuk pelaksanaan kebijakan-kebijakan migrasi yang berangkat dari perspektif historis struktural. Implementasi reformasi struktural membutuhkan kekuatan besar dan terpusat serta kemauan politis yang kuat dan konsisten dari pemerintah pusat yang kuat pula. Hal ini sulit dilakukan di Indonesia karena selain ada korbanan sosial-politik yang besar, kekuatan riil dalam pembuatan keputusan telah bergeser dari tingkat pusat ke daerah. Sentralisasi pembuatan keputusan semacam pengendalian migrasi saat ini sangat tidak populer dan kontraproduktif terhadap semangat otonomi daerah.

### **MIGRASI DAN PEMBANGUNAN REGIONAL DI INDONESIA: Beberapa Fakta Empirik**

Untuk pembuktian empirik hubungan migrasi dan pembangunan regional di Indonesia dibuat suatu analisis korelasi dengan data sekunder yang tersedia. Migrasi diukur dengan tiga konsep yang tersedia yaitu migrasi semasa hidup, migrasi total dan migrasi risen. Ketiga ukuran migrasi ini memberikan gambaran tentang berbagai situasi yang berbeda-beda, sehingga perlu digunakan secara bersama-sama untuk saling melengkapi. *Pertama*, seseorang diklasifikasikan sebagai migran semasa hidup jika propinsi tempat lahirnya berbeda dari propinsi tempat tinggal sekarang. Konsep ini memiliki keuntungan referensi geografis yang jelas dan mudah dipahami, tetapi memiliki kelemahan menganggap perpindahan hanya satu tahap, waktu perpindahan tidak diketahui dan mengabaikan migrasi kembali. *Kedua*, konsep migrasi total menggambarkan seorang migran yang propinsi tempat tinggal sebelumnya berbeda dari propinsi tempat tinggalnya sekarang. Konsep ini hanya memberikan informasi tentang migrasi satu tahap terakhir sekaligus tidak memiliki referensi waktu perpindahannya. *Ketiga*, konsep migrasi risen memisahkan migran dari non-migran berdasarkan propinsi tempat tinggalnya selama lima tahun terakhir. Seorang migran dalam konsep migrasi risen adalah penduduk yang propinsi tempat tinggalnya selama lima tahun sebelumnya berbeda dari propinsi tempat tinggalnya sekarang. Konsep ini memiliki referensi waktu yang jelas, yaitu lima tahun terakhir (Zachariah dalam Rijanta, 1993).

Sementara itu pembangunan regional diukur dengan variabel-variabel yang dapat mencerminkan partisipasi ekonomi penduduk, hasil-hasil pembangunan secara ekonomis dan sosial-demografis yang telah dilakukan pada tingkat agregat propinsi. Variabel-variabel yang dipergunakan untuk mengukur tingkat pembangunan regional selanjutnya dikelompokkan sebagai berikut.

**Partisipasi migran dalam pembangunan regional:**

- a. Proporsi penduduk yang bekerja menurut lapangan kerja (9 variabel)
- b. Proporsi penduduk pencari kerja terhadap angkatan kerja

**Hasil-hasil pembangunan regional:**

- a. Proporsi PDRB sektoral tanpa minyak dan gas (9 variabel)
- b. Proporsi PDRB sektoral dengan minyak dan gas (9 variabel)
- c. Rata-rata PDRB per kapita tanpa minyak dan gas
- d. Rata-rata PDRB per kapita dengan minyak dan gas
- e. Proporsi penduduk melek aksara latin
- f. Produktivitas tanaman padi per satuan luas
- g. Proporsi hasil cocok tanam terhadap kontribusi sektor pertanian

Hasil kajian dari berbagai penelitian yang sudah ada menunjukkan bahwa pola migrasi internal di Indonesia sampai tahun 1995 dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Arus migrasi di Indonesia sebegini besar menuju wilayah kota-kota besar, terutama Jakarta yang dari waktu ke waktu masih memperoleh popularitas yang semakin tinggi (Gambar 1). Hal ini sejalan dengan besarnya bias investasi pembangunan di sekitar wilayah Jabotabek baik yang dilakukan oleh swasta maupun pemerintah, baik yang merupakan penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing. Jakarta masih menjadi pusat yang memiliki daya tarik yang sangat kuat bagi investasi penanaman modal asing, meskipun peranannya dalam penyerapan modal nasional sudah semakin menurun (Hill, 1996).
- b. Arus migrasi lain yang cukup kuat terjadi menuju wilayah di luar Jawa yang memiliki sumberdaya alam khususnya minyak, gas alam, batubara dan hutan. Ini sangat relevan menjelaskan migrasi ke Propinsi Riau dan Kalimantan Timur. Pembukaan hutan dan areal penambangan di kedua propinsi ini memberikan kesempatan kerja yang sangat terbatas bagi tenaga-tenaga profesional yang memang banyak berasal dari Jawa. Arus migrasi yang lebih besar sebenarnya berasal dari penduduk Jawa yang kurang berpendidikan dengan ketrampilan terbatas, tetapi tertarik dengan rembesan dari kemajuan ekonomi berbasis ekstraksi sumberdaya alam.
- c. Masih terdapat arus migrasi yang kuat antara Pulau Sumatera dan Jawa. Sebagian dari proses ini berupa migrasi berantai (*chain migration*) yang dipicu oleh program kolonisasi dan transmigrasi sejak tahun 1905 (Tirtosudarmo, 1987). Arus Jawa-Sumatera ini mencerminkan perpindahan penduduk marginal Jawa ke wilayah pertanian baru. Selain itu dijumpai pula arus migrasi dari Sumatera ke Jawa yang didominasi tenaga-tenaga muda untuk memperoleh pendidikan tinggi di Jawa.
- d. Arus migrasi ke wilayah timur Indonesia mulai meningkat secara signifikan sampai dengan tahun 1990an (Rijanta, 1993). Hal tersebut dipacu oleh semakin besarnya komitmen pemerintah untuk membangun wilayah ini melalui berbagai kebijakan seperti preferensi dalam investasi, penerapan insentif dan disinsentif untuk investasi, penetapan kawasan pengembangan ekonomi terpadu (KAPET) serta penetapan

wilayah otorita pembangunan. Konflik SARA yang melanda sebagian kawasan ini diperkirakan menurunkan minat bermigrasi ke kawasan timur. Terjadinya pengungsian akibat pengusiran yang bermotif konflik SARA semakin menurunkan minat bermigrasi. Hal ini tidak kondusif untuk mendorong migrasi ke kawasan timur dalam rangka mencapai keserasian perkembangan antarwilayah

- e. Secara keseluruhan migrasi yang terjadi di Indonesia masih memperkuat kesenjangan antardaerah. Terbentuknya kesenjangan antar wilayah ini di antaranya disumbang oleh kesenjangan neraca tingkat pendidikan migran dari Jawa dan luar Jawa. Penduduk yang bermigrasi masuk ke Jawa pada umumnya adalah mereka yang mengejar pendidikan tinggi. Hanya sebagian saja di antara mereka yang kembali ke daerah asalnya. Sebagian justru menetap di Jawa setelah terdidik. Sebaliknya pelaku migrasi dari Jawa ke luar Jawa adalah penduduk yang tidak mampu berkompetisi memperoleh kesempatan ekonomi di Jawa. Mereka adalah kelompok masyarakat yang miskin dan kurang terdidik (Titus, 1992 dan Rijanta, 1993).

Hasil analisis data tahun 1995 menunjukkan masih berlanjutnya kesenjangan antardaerah di Indonesia. Hal ini ditunjukkan oleh hasil analisis korelasi yang cukup kuat antara variabel-variabel migrasi di satu sisi dengan variabel-variabel pada kelompok perkembangan daerah baik dari segi penduduk yang bekerja maupun PDRB yang dihasilkan secara sektoral. Migrasi berhubungan secara positif, kuat dan signifikan dengan variabel-variabel sektor ekonomi modern dan berhubungan secara negatif dengan sektor ekonomi tradisional.

Antara migrasi dan lapangan kerja sektoral menunjukkan adanya positif yang kuat dan signifikan pada sektor-sektor ekonomi modern dan hubungan negatif yang kuat dan signifikan pada sektor pertanian (Lampiran 1). Hubungan positif yang kuat antara migrasi dengan perkembangan sektor ekonomi modern menunjukkan bahwa secara nasional migrasi di Indonesia masih sangat didominasi oleh migrasi desa-kota. Hal ini menguatkan preposisi sebelumnya bahwa arus migrasi desa-kota tampaknya masih terus menguat, bahkan sampai periode pertengahan 1990an. Dalam situasi krisis laju perpindahan penduduk desa-kota tidak mengalami penurunan. Hal ini berkaitan erat dengan adanya mekanisme *self inflatory* dalam dunia kerja sektor informal yang terus tumbuh di kota. Justru dalam situasi krisis sektor informal kota diduga kuat menemukan momentum pertumbuhannya, karena sebagian besar segmen pasar menengah-bawah yang terpuruk oleh krisis beralih menggunakan barang dan jasa yang ditawarkan murah oleh sektor ini.

Pada tingkat kebijakan diharapkan agar migrasi antardaerah yang diorganisasikan oleh pemerintah dapat memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan daerah melalui pengembangan sektor pertanian di luar Jawa. Harapan-harapan ini sampai saat ini tampaknya masih sulit untuk direalisasikan. Bukti-bukti menunjukkan bahwa arus migrasi yang berorientasi ekonomi modern di kota masih lebih kuat daripada migrasi yang berorientasi kegiatan-kegiatan ekonomi primer yang identik dengan wilayah-wilayah di luar Jawa dengan berbagai kesulitan-kesulitannya.

Ini bukan berarti migrasi ke luar Jawa tidak memberikan kontribusi pada pembangunan regional. Pada tingkat observasi yang lebih rendah, misalnya dalam wilayah propinsi atau dalam wilayah kabupaten, wilayah-wilayah di luar Jawa juga mengalami keragaman pengalaman empiriknya dalam hal hubungan antara migrasi dan pembangunan regional. Studi kasus dalam bagian akhir paper ini memberikan ilustrasi tentang migrasi dalam pembangunan regional di wilayah *frontier*.

Jika diamati lebih lanjut tentang hubungan antara migrasi dan kapasitas produksi daerah seperti tercermin dari PDRB total dan PDRB tanpa minyak dan gas masih terdapat hubungan yang sejalan dengan hubungan antara migrasi dan lapangan pekerjaan seperti diuraikan di atas. Dalam hubungan antara migrasi sektor-sektor ekonomi dalam PDRB baik dengan maupun tanpa minyak dan gas masih jelas hubungan negatif yang cukup kuat dan signifikan dengan sektor pertanian. Namun demikian untuk berbagai sektor modern yang lain hanya tinggal sektor perbankan yang masih berhubungan positif secara signifikan dengan migrasi, baik dalam kondisi PDRB dengan maupun tanpa minyak dan gas (Lampiran 2 dan 3). Meskipun dari segi lapangan kerja terjadi hubungan yang cukup jelas antara migrasi dan sektor-sektor ekonomi modern maupun ekonomi tradisional, namun hubungan migrasi dengan sektor-sektor ekonomi modern lainnya menjadi kabur. Hal ini mengindikasikan bahwa kebanyakan migran terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang hanya memiliki kontribusi kurang substansial dalam pengembangan kapasitas produksi daerah. Atau dengan kata lain kontribusi migrasi dalam pembangunan regional lebih terletak pada terbukanya lapangan kerja, tetapi belum sampai pada peningkatan kapasitas produksi daerah tujuan secara substansial.

Fakta juga menunjukkan bahwa PDRB per kapita tanpa minyak dan gas ternyata memiliki hubungan positif yang sangat signifikan dengan migrasi total dan migrasi semasa hidup. Hal ini justru harus dilihat sebagai indikator adanya hubungan yang kuat antara ekonomi yang sedang berkembang sebagai produk investasi sebelumnya yang merupakan salah satu daya tarik bermigrasi (Lampiran 4). Dari tabel tersebut juga dapat diamati adanya hubungan positif yang cukup kuat dan signifikan antara migrasi dengan penanaman modal asing. Ini kembali menguatkan preposisi masih pentingnya orientasi migrasi ke kota, terutama periode lima tahun sebelum 1995 seperti ditunjukkan oleh koefisien korelasi antara investasi penanaman modal asing dan migrasi risen.

Hubungan migrasi dengan pembangunan di bidang sosial budaya tampaknya lebih sulit diamati pada tingkat analisis agregat propinsi. Variabel-variabel yang dapat merepresentasikan perkembangan sosial budaya seperti persentase penduduk melek huruf latin, jumlah penduduk bersekolah di sekolah dasar untuk setiap 1.000 penduduk dan jumlah penduduk bersekolah di sekolah lanjutan untuk setiap 1.000 penduduk tidak satupun menunjukkan hubungan yang jelas dengan ketiga variabel migrasi yang ada. Seperti dikemukakan pada bagian awal paper ini migrasi secara agregat diharapkan juga memiliki dampak terhadap kondisi struktur sosial-demografi di daerah tujuan. Mengingat besarnya proporsi migrasi di Indonesia, khususnya menurut konsep migrasi total dan migrasi semasa hidup, ketidakjelasan hubungan antara variabel sosio-

demografi ini lebih disebabkan oleh kurang pekanya variabel yang digunakan dalam analisis. Pada tingkatan mikro rumahtangga migran cenderung memiliki ukuran lebih besar dan struktur lebih kompleks dibandingkan rumahtangga non-migran (Rotge et al, 1995).

## PROSPEK MIGRASI DALAM ERA OTONOMI DAERAH

Memperhatikan konstelasi makro dalam dinamika migrasi antarwilayah yang masih menunjukkan pola Jakarta sentris, maka muncul satu permasalahan baru bagi wilayah *frontier* untuk melakukan pembangunan. Di satu sisi otonomi harus disambut dengan upaya membangun daerah sesuai potensi dan kebutuhan masyarakat, namun di sisi lain kebutuhan tenaga kerja tidak dapat dipenuhi dari daerah setempat baik karena *miss-match* dari segi ketrampilan maupun karena masalah perbedaan tradisi produksi (PSPPR-UGM, 2002).

Hal ini berlaku untuk wilayah *frontier* yang kaya sumberdaya alam tetapi mengalami kelangkaan sumberdaya manusia yang sesuai kebutuhan pembangunan. Dengan semakin terbatasnya pengiriman transmigran oleh pemerintah pusat karena pelaksanaan otonomi daerah, pasokan sumberdaya manusia di wilayah *frontier* semata-mata mengandalkan migrasi spontan sesuai mekanisme pasar. Jika kebutuhan tenaga kerja merupakan hal yang sangat mendesak, wilayah-wilayah *frontier* perlu melaksanakan upaya menarik migrasi masuk dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Untuk menarik migran masuk perlu disiapkan berbagai prasarana serta perangkat kelembagaan yang dapat memberikan legalitas fungsi-fungsi baru pada tingkat daerah agar dapat menggantikan peranan departemen transmigrasi. Dalam rangka otonomi daerah sangat mungkin dibuka kerjasama antara wilayah *frontier* dengan daerah asal tenaga kerja migran. Seleksi migran dapat dilakukan secara lebih fleksibel sesuai dengan kebutuhan riil di daerah tujuan.

Keberhasilan menarik migran dari wilayah lain melalui mekanisme ini ditentukan oleh faktor-faktor seperti komitmen dan konsistensi pemerintah daerah, peran serta swasta dalam pengembangan kegiatan agribisnis, keterbukaan masyarakat lokal terhadap pendatang dari luar daerah, dan partisipasi aktif masyarakat lokal dalam mewujudkan misi pembangunan wilayahnya. Meskipun demikian terdapat juga ancaman dari munculnya peluang ekonomi alternatif di tempat tujuan yang lebih cepat menjanjikan pendapatan dari pada mengembangkan kegiatan pertanian dengan segala risikonya. Namun demikian permasalahan ini bukan hanya kelemahan dari model transfer tenaga kerja antardaerah semacam ini, tetapi juga menjadi masalah dalam penyelenggaraan program transmigrasi sebelumnya. Sementara itu bagi wilayah yang mengalami surplus tenaga kerja, otonomi daerah hendaknya ditangkap sebagai peluang melakukan kerjasama antarwilayah yang dapat memberikan perbaikan ekonomi bagi anggota masyarakat.

## KESIMPULAN

Secara teoretik terdapat dua pandangan yang berseberangan tentang hubungan antara migrasi dan pembangunan. Perspektif neo-klasik menganggap migrasi sebagai salah satu bentuk respon atas dislokasi persebaran sumberdaya ekonomi, sehingga dengan migrasi akan terjadi pola distribusi sumberdaya ekonomi yang lebih efisien. Oleh karena itu pandangan kelompok neo-klasik terhadap hubungan antara migrasi dan pembangunan adalah positif, sehingga migrasi dibutuhkan sebagai salah satu instrumen moderat dengan risiko sosial-politik terkecil untuk mengoreksi kesenjangan antardaerah. Kebijakan-kebijakan migrasi di banyak negara sedang berkembang, termasuk Indonesia dapat dikategorikan berakar dari pandangan neo-klasik.

Sementara itu pandangan historis struktural menganggap migrasi di negara-negara sedang berkembang sebagai produk dari hubungan-hubungan struktural yang berakar dari sejarah kolonisasi. Negara-negara sedang berkembang cenderung ditempatkan dalam posisi *periphery* dari satu sistem ekonomi-politik global dan dalam posisi tereksplorasi sebagai konsekuensi hubungan struktural asimetris yang tercipta sejak jaman kolonial. Migrasi merupakan bentuk respon atas ketimpangan struktural dalam hubungan *center-periphery*, sehingga arahnya cenderung dominan ke kota-kota besar dengan ekonomi kapitalis yang kuat. Migrasi dipandang sebagai salah satu bentuk eksploitasi *periphery* oleh *center*, sehingga sebaiknya dikoreksi melalui perubahan struktural. Upaya pengendalian migrasi tidak akan efektif tanpa perubahan struktural yang mendasar.

Pola migrasi di Indonesia sampai dengan tahun 1995 masih bersifat Jakarta sentris. Dengan demikian sifatnya cenderung memperkuat kesenjangan antarwilayah yang telah ada. Selain itu arus migrasi yang cukup kuat terjadi ke wilayah-wilayah *frontier* yaitu propinsi-propinsi dengan sumberdaya alam yang melimpah dalam bentuk minyak, gas, hutan dan batubara seperti Kalimantan Timur dan Riau. Migrasi berantai (*chain migration*) oleh kelompok petani marginal Jawa banyak terjadi pada jalur Jawa Sumatera sebagai jalur tradisional kelanjutan kolonisasi dan transmigrasi. Pada jalur migrasi Jawa - Sumatera ini juga terdapat arus sebaliknya yang merupakan migrasi untuk memperoleh pendidikan tinggi di Jawa. Dengan demikian neraca migrasi antara Jawa dan Sumatera cenderung menguntungkan bagi Jawa karena sumberdaya manusia yang masuk lebih terdidik, masih relatif muda dan tidak miskin, sedangkan migran yang keluar dari Jawa adalah kelompok keluarga petani yang relatif miskin dan kurang terdidik.

Hubungan antara migrasi dan pembangunan regional di Indonesia dapat ditunjukkan dengan adanya korelasi yang positif, cukup kuat dan signifikan antara variabel-variabel migrasi dengan lapangan kerja di sektor modern. Sementara itu hubungannya dengan lapangan kerja sektor pertanian cenderung negatif, cukup kuat dan signifikan. Ini menunjukkan masih adanya pola migrasi yang memusat ke kota-kota besar di mana lapangan kerja sektor modern kebanyakan berada.

Jika dilihat korelasi antara migrasi dengan pangsa pendapatan daerah, masih terdapat pola yang konsisten bahwa migrasi berhubungan positif dengan sektor modern dan berhubungan negatif dengan sektor pertanian. Namun demikian tampak jelas bahwa jumlah dan jenis sektor modern yang berhubungan positif dengan migrasi mengalami penurunan drastis, karena hanya sektor perbankan saja yang masih tetap berkorelasi positif dengan migrasi. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara migrasi dengan pembangunan regional sangat bermakna dalam hal kesempatan kerja, namun masih kurang signifikan hubungannya dengan peningkatan kapasitas produksi daerah seperti yang tercermin dari angka-angka PDRB.

Variabel-variabel sosial-demografi yang semula diduga berhubungan kuat dengan variabel-variabel migrasi ternyata juga tidak terbukti secara jelas. Hal ini mungkin terjadi karena banyak variabel sosio-demografi yang tidak cukup sensitif untuk diukur dan dihubungkan dengan migrasi pada tingkat analisis ini. Pada tingkatan mikro ditemukan bukti-bukti bahwa migran cenderung mengorganisasikan dirinya ke dalam struktur rumah tangga yang kompleks dengan rata-rata ukuran yang lebih besar.

Studi kasus pembangunan regional di wilayah *frontier* menunjukkan bahwa wilayah-wilayah semacam ini akan mengalami permasalahan dalam pemenuhan kebutuhan tenaga kerja karena tidak adanya pasokan tenaga kerja melalui program transmigrasi dalam rangka pembangunan daerah melalui pengembangan sektor pertanian. Ini bukan berarti mobilitas tenaga kerja secara spontan tidak terjadi, tetapi arus migrasi spontan cenderung berasosiasi dengan kegiatan-kegiatan industri pengolahan hasil hutan. Atau dengan kata lain kebutuhan tenaga kerja riil tidak dapat dipenuhi dari migrasi masuk, karena mereka tidak memiliki aspirasi yang sejalan dengan misi pembangunan daerah. Dalam otonomi daerah ini sebagian besar wilayah *frontier* menempatkan pembangunan agribisnis sebagai sasaran utamanya, bahkan juga untuk wilayah dengan potensi sumberdaya minyak dan gas yang cukup besar. Ini merupakan bentuk kesadaran baru bahwa sumber-sumber pendapatan dari agribisnis dipandang lebih *sustainable* dari pada sumber minyak dan gas.

Sementara untuk memperoleh tenaga kerja sebagai penggarap lahan-lahan potensial di wilayah *frontier* sampai saat ini belum ada sistem *rekrutmen* yang terbentuk. Kerjasama antarkabupaten dengan wilayah-wilayah yang mengalami surplus tenaga kerja merupakan salah satu alternatif solusinya. Hal ini dapat dilakukan secara selektif untuk memperoleh tenaga kerja yang memiliki motivasi yang tinggi dan secara teknis sesuai dengan kebutuhan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amin, Samir, 1974. *Modern Migration in Western Africa*, Oxford University Press, Oxford.
- Biro Pusat Statistik, 1997. *Publikasi Hasil Supas 1995, Seri S-2*, BPS, Jakarta.
- Biro Pusat Statistik, 1997. *Produk Domestik Regional Bruto Propinsi-propinsi di Indonesia*, Biro Pusat Statistik, Jakarta.
- Harriss, Barbara and John Harriss, 1984. Generatic or Parasitic Urbanism : Some Observations from the Recent History of a South Indian Market Town, *Journal of Development Studies*, Vol. 20, No. 3, pp: 82-101.
- Hill, Hal, 1996. *Transformasi Ekonomi Indonesia Sejak 1966*, Terjemahan: Tim Penerjemah PAU Ekonomi UGM, Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Ho, Samuel P., 1979. Decentralised Industrialisation and Rural Development: Evidence from Taiwan, *Economic Development and Cultural Change*, No. 28, pp: 77-96.
- Ho, Samuel P., 1982. Economic Development and Rural Industry in Japan, South Korea and Taiwan, *World Development*, Vol. 10, No. 11, pp: 973-990.
- Hugo, G.J. 1987. Population Mobility Causes and Effects. Chapter 7 in G.J. Hugo, V.J. Hull and T.H. Hull (ed.), *The Demographic Dimension in Indonesian Development*, Oxford University Press, Singapore.
- Kusnetz, Simon and Thomas, Dorothy, 1958. *Internal Migration and Economic Growth*. The Bobbs-Merrill Reprint Series in Social Studies of Migration, Millbank Memorial Fund, New York.
- Limanonda, Bhassorn and Tirasawat, Penporn, 1987. *Population Mobility and Development Issues: Thailand*, Institute of Population Studies Chulalongkorn University, Bangkok.
- Mantra, Ida Bagoes, 1989. Mobilitas Sirkuler di Indonesia, *Kertas kerja Disampaikan pada Widya Karya Migrasi dan Pembangunan Regional*, KMN-KLH, Jakarta.
- Oberay, A.S. and Bilsborrow, Richard E., 1984. Theoretical Perspectives on Migration. Chapter 2 in Bilsborrow, R.E., Oberay, A.S, Standing, G. (ed.), *Migration urveys in Low-Income Countries*, London and Sydney: Croom and Helm.
- PSPPR-UGM, 2002. *Perencanaan dan Studi Kelayakan Studi Kelayakan Peluang Usaha Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Siak*, PSPPR-UGM, Yogyakarta.
- Rigg, Jonathan, 2001. *More than the Soil: Rural Change in Southeast Asia*, Prentice Hall Publishers, Singapore.
- Rijanta, R., 1993. *Analisa Perkembangan Kependudukan Menurut Sensus Penduduk 1990: Dinamika Mobilitas Pulau Jawa*, Kantor Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup, Jakarta.
- Rotge, Vincent L, Ida Bagoes Mantra dan R. Rijanta, 1995. Rural-urban Integration in Java: Consequences for regional Development and Employment, *UNCRD Report Series No. 6*. United Nations Center for Regional Development (UNCRD). Nagoya.

- Samuel, John, 1998. *Migration and Development*, John Samuel and Associates,, Ottawa.
- Tirtosudarmo, Riwanto, 1987. *From Emigratie to Transmigrasi: Continuity and Changes in Migration Policies in Indonesia*, Working Paper No. 97 - 05. Population Studies and Training Center Brown University.
- Titus, M.J., 1978. Interregional Migration in Indonesia as a Reflection of Social and Regional Inequalities, *Tijdschrift voor Economic en Social Geografie*, 4(69). Utrecht University, Utrecht.
- Titus, M.J., 1992. A Tentative Analysis of Regional Inequalities in Economic Development in Indonesia. *Paper presented at the International Conference on Geography in the ASEAN Region*, 31 Agustus - 3 September 1992, Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada, Ikatan Geograf Indonesia (IGI) dan Ikatan Geografiwan Gadjah Mada (IGEGAMA), Yogyakarta.

**Lampiran 1. Korelasi antara Migrasi dan Penduduk yang Bekerja Secara Sektoral Indonesia, 1995**

Nama-nama Variabel		Persen penduduk migran total	Persen penduduk migran risen	Persen penduduk migran seumur hidup
Persen pekerja di sektor pertanian	Pearson Correlation Sig. (2-tailed)	-,727 ,000	-,627 ,000	-,627 ,000
Persen pekerja di sektor pertambangan	Pearson Correlation Sig. (2-tailed)	,121 ,549	,112 ,579	-,117 ,563
Persen pekerja di sektor industri	Pearson Correlation Sig. (2-tailed)	,517 ,006	,340 ,083	,559 ,002
Persen pekerja di sektor listrik dan gas	Pearson Correlation Sig. (2-tailed)	,630 ,000	,656 ,000	,524 ,005
Persen pekerja di sektor konstruksi	Pearson Correlation Sig. (2-tailed)	,489 ,010	,320 ,104	,385 ,047
Persen pekerja di sektor perdagangan	Pearson Correlation Sig. (2-tailed)	,605 ,001	,497 ,008	,612 ,001
Persen pekerja di sektor angkutan	Pearson Correlation Sig. (2-tailed)	,522 ,005	,502 ,008	,330 ,093
Persen pekerja di sektor keuangan	Pearson Correlation Sig. (2-tailed)	,793 ,000	,820 ,000	,504 ,007
Persen pekerja di sektor jasa-jasa	Pearson Correlation Sig. (2-tailed)	,784 ,000	,783 ,000	,614 ,001
Jumlah observasi	N	27	27	27

\*\* Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**Lampiran 2. Korelasi antara Migrasi Penduduk dan Persentase PDRB Sektoral Tanpa Migas Indonesia, 1995**

Nama-nama Variabel		Persen penduduk migran total	Persen penduduk migran seumur hidup	Persen penduduk migran risen
Persen PDRB pertanian	Pearson Correlation Sig. (2-tailed)	-,610 ,001	-,406 ,036	-,528 ,005
Persen PDRB pertambangan	Pearson Correlation Sig. (2-tailed)	-,045 ,825	-,265 ,181	,092 ,649
Persen PDRB industri	Pearson Correlation Sig. (2-tailed)	,272 ,170	,203 ,310	,095 ,639
Persen PDRB listrik, air dan gas	Pearson Correlation Sig. (2-tailed)	,254 ,202	,360 ,065	,150 ,456
Persen PDRB konstruksi	Pearson Correlation Sig. (2-tailed)	,172 ,390	,098 ,627	,230 ,248
Persen PDRB perdagangan	Pearson Correlation Sig. (2-tailed)	,237 ,234	,322 ,102	,049 ,809
Persen PDRB transportasi	Pearson Correlation Sig. (2-tailed)	,032 ,873	,134 ,506	-,044 ,826
Persen PDRB keuangan dan perbankan	Pearson Correlation Sig. (2-tailed)	,835 ,000	,691 ,000	,758 ,000
Persen PDRB jasa-jasa	Pearson Correlation Sig. (2-tailed)	-,143 ,478	,191 ,341	-,121 ,547
Jumlah observasi	N	27	27	27

\*\* Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**Lampiran 3. Korelasi antara Migrasi Penduduk dan Persentase PDRB Sektoral Tanpa Migas Indonesia, 1995**

Nama-nama Variabel		Persen penduduk migran total	Persen penduduk migran seumur hidup	Persen penduduk migran risen
Persen PDRB pertanian tanpa migas	Pearson Correlation Sig. (2-tailed)	-,656 ,000	-,505 ,007	-,561 ,002
Persen PDRB pertambangan tanpa migas	Pearson Correlation Sig. (2-tailed)	-,084 ,675	-,201 ,315	,039 ,846
Persen PDRB industri tanpa migas	Pearson Correlation Sig. (2-tailed)	,271 ,172	,220 ,270	,128 ,525
Persen PDRB listrik, air dan gas tanpa migas	Pearson Correlation Sig. (2-tailed)	,278 ,160	,327 ,096	,193 ,336
Persen PDRB konstruksi tanpa migas	Pearson Correlation Sig. (2-tailed)	,189 ,345	,042 ,835	,269 ,175
Persen PDRB perdagangan tanpa migas	Pearson Correlation Sig. (2-tailed)	,304 ,124	,283 ,153	,124 ,539
Persen PDRB transportasi tanpa migas	Pearson Correlation Sig. (2-tailed)	,075 ,711	,027 ,896	,023 ,911
Persen PDRB keuangan dan perbankan tanpa migas	Pearson Correlation Sig. (2-tailed)	,864 ,000	,650 ,000	,814 ,000
Persen PDRB jasa-jasa tanpa migas	Pearson Correlation Sig. (2-tailed)	-,164 ,413	,171 ,395	-,130 ,517
Jumlah observasi	N	27	27	27

\*\* Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**Lampiran 4. Hubungan Antara Migrasi dan Beberapa Variabel Sosial Ekonomi Indonesia, 1995**

Nama-nama Variabel		Persen penduduk migran total	Persen penduduk migran risen	Persen penduduk migran seumur hidup
PDRB per kapita	Pearson Correlation Sig. (2-tailed)	,324 ,099	,380 ,051	-,031 ,879
PDRB per kapita tanpa minyak	Pearson Correlation Sig. (2-tailed)	,686 ,000	,683 ,000	,277 ,161
Persen PMA	Pearson Correlation Sig. (2-tailed)	,474 ,012	,448 ,019	,265 ,181
Persen PMDN	Pearson Correlation Sig. (2-tailed)	,092 ,650	,016 ,935	,007 ,971
Produktivitas padi 000 kg/ha	Pearson Correlation Sig. (2-tailed)	-,386 ,047	-,511 ,006	,071 ,727
Persen nilai hasil bumi thd pertanian	Pearson Correlation Sig. (2-tailed)	-,319 ,105	-,308 ,118	-,396 ,041
Kepadatan jalan aspal	Pearson Correlation Sig. (2-tailed)	,188 ,348	-,070 ,727	,464 ,015
Penduduk bersekolah lanjutan/1000	Pearson Correlation Sig. (2-tailed)	,261 ,188	,242 ,223	,188 ,348
Penduduk bersekolah dasar/1000	Pearson Correlation Sig. (2-tailed)	-,059 ,769	-,011 ,955	-,032 ,874
	N	27	27	27

\*\* Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).